**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terletak ditengah-tengah benua Amerika Utara, yang dibatasi oleh Kanada di sebelah Utara dan Meksiko di sebelah Selatan.[[1]](#footnote-2) Amerika telah mendapatkan kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 dengan memiliki tiga belas wilayah koloni bekas koloni Britania Raya (Inggris).[[2]](#footnote-3)

Prinsip-prinsip dasar politik dan pemerintahan Amerika bersumber dari pengalaman masa kolonial pada abad ke-17. Pada abad ini dibawah tekanan-tekanan politik kerajaan di Ingrris lahir pemikiran politik tentang kebebasan individu. Kelahiran pemikiran politik ini merupakan reaksi terhadap keganasan pemerintah kerajaan yang tidak memberi tempat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Ditengah situasi politik represif inilah mucul para pemikir yang buah pikirannya kemudian menjadi dasar ideology bangsa Amerika. Pemikiran-pemikiran mereka sama sekali tidak disukai oleh pemerintah kerajaan Inggris. Akan tetapi, secara perlahan-lahan

pemikiran tersebut menyebrang ke benua baru dan kemudian tumbuh subur di Amerika.[[3]](#footnote-4)

Konstitusi Amerika saat ini merupakan karya dari 13 Negara Bagian pertama yang menyatakan kemerdekaan dari koloni Inggris pada tanggal 4 Juli 1776. Ketika bangsa Amerika memproklamirkan kemerdekaannya, ia telah berada di bawah koloni Inggris selama kurang lebih satu abad. Pengalaman masa kolonial ini menyebabkan budaya Eropa sangat dominan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan budaya Amerika dikemudian hari. Setahun kemudian, merka sepakat untuk menyusun cikal bakal konstitusi yang dikenal sebagai *“Article of Confederation.”* Tahun 1778 “*Article”* ini secara resmi di tandatangani, namum baru bisa dikatakan sah dan bersifat mengikat setelah Negara Bagian ketiga belas, Mariland, meratifikasinya pada bulan Maret 1781. Melalui berbagai perdebatan, akhirnya cikal bakal ini diganti secara menyeluruh dan diratifkasi pada tahun 1789. Konstitusi ini berbeda dengan *“Article of Confederation”* dalam hal kekuasaan pemerintahan federal.[[4]](#footnote-5)

Konstitusi Amerika merupakan wujud nyata dari kompromi dan tawar menawar dari berbagai pemikiran para Bapak Pendiri Amerika. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa rakyat Amerika yang sebagian besar merupakan keturunan pendatang dari Eropa sangat tidak menyukai hal-hal yang berbau Inggris. Oleh karena itu, mereka menyusun sebuah negara yang sama sekali berbeda dengan model kerajaan Inggris, yaitu pemerintahan yang Persidensiil. Pemerintahan Amerika adalah pemerintahan oleh rakyat, dalam arti bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat Negara-negara Bagian.

Semua orang tahu bahwa saat ini Amerika adalah negara adidaya. Amerika telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan kekuatan politik. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, negara yang sering disebut Negeri Paman Sam ini terus maju menjadi negara yang menguasai perindustrian, bahkan pengaruh negara ini semakin luas hingga menjadi pusat teknologi dunia setelah pecahnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan setelah Uni Soviet sebagai Blok Timur mengalami keruntuhan, Amerika Serikat sebagai Blok Barat secara otomatis atau saat itu juga menduduki posisi tertinggi yaitu sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia.[[5]](#footnote-6)

Dengan posisi Amerika sebagai negara adidaya, Amerika makin merajalelah dan ekspansif dalam upaya menunjukkan keadidayaannya, sehingga setiap keputusan yang terjadi pada pemerintahan negara tersebut sangat berpengaruh pada negara-negara di dunia. Kebijakan luar negeri Amerika selalu hadir di seluruh penjuru dunia. Ia laksana dewa penolong dan berlagak menjadi pahlawan. Sekilas, kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika akan memberikan angin segar bagi dunia. Namun, dibalik semua itu, Amerika memiliki tujuan yang sangat licik, yaitu untuk menguasai dunia. Amerika menginginkan dunia ada dalam genggaman tangannya. [[6]](#footnote-7)

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tak lepas dari kepentingan nasionalnya yaitu untuk melindungi warga negara, teritorial, mata pencaharian, dan melindungi negara sekutu. Politik luar negeri Amerika Serikat selalu sejalan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Politik luar negeri Amerika mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik maupun internasional. Politik luar negeri AS dinamis menyesuaikan kepentingan nasional dan konteks internasional yang sedang dihadapi. Setiap periode kepemimpinan menetapkan prioritas tertentu terkait politik luar negeri AS yang menunjukan adanya perubahan yang menarik.

Sejarah perkembangan politik luar negeri Amerika mengalami perubahan dari politik isolasionis menuju politik aktifis sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat domestic maupun di tingkat global. Politik isolasionis merupakan pilihan para pengambil keputusan di Amerika sepanjang abad ke-18 sampai abad ke-20. Piliham ini diambil sebagai konsekwensi dari sikap tidak ingin mencampuri urusan bangsa lain. Perang antara bangsa di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19 merupakan factor eksternal yang ikut mendorong tumbuhnya sikap isolasionis tersebut.[[7]](#footnote-8)

Secara umum atau secara global, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan negara Paman Sam tersebut untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke seantero penjuru dunia atau dengan kata lain melakukan demokratisasi secara internasional. Kebijakan atau Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan ekternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat.[[8]](#footnote-9)

Untuk proses perumusan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif, yakni Presiden dapat[[9]](#footnote-10):

1. Memberikan respon atas peristiwa internasional.
2. Mengajukan proposal kepada kongres.
3. Melakukan negosiasi terhadap perjanjian internasional.
4. Memberikan statement kebijakan.
5. Melakukan aksi independent.

Sementara itu mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh legislatif :

1. Memberikan statement kebijakan dan resolusi.
2. Memberikan arahan legislatif.
3. Melakukan pressure legislatif.
4. Melakukan pembatasan-pembatasan legislatif seperti menolak pembiayaan.
5. Memberikan saran informal kepada eksekutif.
6. Memberikan pandangan kongres atas suatu proposal yang disampaikan oleh eksekutif.

Pada masa pemerintahan George W. Bush, kebijakan luar negeri Amerikat Serikat tetap pada dasarnya yaitu mengedepankan penyebaran demokrasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Pemerintahan pada masa Bush ini juga sangat menonjolkan penerapan instrumen militer ataupun isu-isu keamanan dalam kebijakan-kebijakan politik luar negerinya. Namun, pasca tragedi 9/11 arah kebijakan Bush lebih terfokus pada perang terhadap teroris. Hal tersebut makin diperjelas dengan dikeluarkannya *The National Security Strategy of the United States[[10]](#footnote-11)*, yang dianggap sebagai dokumen yang mewakili kebijakan luar negeri Presiden Bush sebagai pernyataan perang terhadap terorisme.

Namun tetap Bush tidak lupa untuk memikirkan kepentingan ekonomi Amerika. Secara khusus, dalam buku putih kebijakan pertahanan Amerika Serikat, disebutkan hubungan eksplisit antara perluasan perdagangan bebas dengan pengurangan ancaman terorisme, sebagai berikut: “AS akan aktif bekerja untuk mengembangkan demokrasi, pembangunan, pasar bebas dan perdagangan bebas ke seluruh pelosok dunia. Peristiwa 11 September 2001 telah mengajarkan bahwa sebuah negara lemah seperti Afghanistan bisa menjadi ancaman serius bagi kepentingan nasional bangsa besar seperti Amerika Serikat. Kemiskinan memang tidak membuat orang miskin menjadi teroris dan pembunuh. Akan tetapi kemiskinan, lemahnya lembaga-lembaga negara, dan korupsi bisa membuat negara-negara yang lemah menjadi rawan terhadap jaringan teroris yang beroperasi di dalam wilayah perbatasannya”.[[11]](#footnote-12)

Kebijakan dan sikap Amerika itu mendapat pertentangan dari negara di berbagai belahan dunia yang merasa dirugikan oleh Amerika. Sejarah berkata, sejak perang dunia I dan perang dunia II, hingga sekarang, banyak tokoh dunia yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh Amerika.[[12]](#footnote-13) Petualangan politik dan kekuasaan Amerika dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush dinilai banyak kalangan telah kelewat batas. Semua bermuara pada dua hal, yaitu kekuasaan dan ekonomi. Bahasa modernnya, meminjam istilah Syafii Maarif, Amerika bak penjajah disiang bolong yang tak kebagian penjajahan di masa lalu.[[13]](#footnote-14)

Untuk mempertahankan citra supermasi keadidayaannya, dengan mengangkat isu HAM dan demokrasi, dan terakhir yang selalu hangat dibicarakn dan menjadi agenda global Amerika adalah isu perang melawan terorisme. Amerika demikian gencar melakukan intervensi, ekspansi pengaruh hingga invasi militer ke negara-negara yang bermasalah dan mengaalami kesulitan untuk memecahkan masalahnya. Tetapi intervensi itu tidak akan dilakukan terhadap negara-negara besar atau negara-negara kuat. Melainkan negara-negara kecil tak berdaya. Semisal Afghanistan.[[14]](#footnote-15)

Afghanistan adalah sebuah negara yang namanya kerap kali disebut saat kita membicarakan konflik-konflik besar. Ia menjadi garis depan di dalam perang dingin, saat Negara-negara Barat berbondong-bondong memberikan dukungannya terhadap perjuangan kaum Mujahidin Afghanistan terhadap pendudukan Uni Soviet. Di dalam perang terhadap terror yang dicanangkan Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11, Afghanistan menjadi sasaran pertama dalam “perang anti terror” Amerika Serikat, karena dianggap menjadi tempat berlabuhnya jaringan teroris internasional.

Dalam sejarahnya, Afghanistan berkali-kali mengalami serbuan dari kekuatan luar sejak masa pra-sejarah. Pada tahun 642, Afghanistan menjadi benteng Islam seiring dengan tumbangnya kekaisaran Persia. Pada tahun 1778, Afghanistan menjadi wilayah perebutan antara Inggris dan Rusia. Memperebutkan kekuasaan wilayah yang strategis itu terjaid sampai dua kali Perang Afghanistan, yang pertama pada tahun 1839-1842 dan yang kedua pada 1878-1880 yag dimenangkan oleh Inggris.[[15]](#footnote-16)

Konflik ini mengubah wajah Afghanistan. Selama satu dasawarsa (1880-1901), Afghanistan menjadi kondominium Inggris-Rusia dibawah Amir Abdur-Rahman. Pada tahun 1931 kondominium Ingris-Rusia berakhir dan Afghanistan menjadi sebuah kerajaan konstitusional dengan lembaga Shura yang terdiri dari kepala-kepala suku berfungsi sebagai parlemen. Pada tahun 1973, terjadi kudeta oleh Muhammad Daoud yang sekaligus menjadi presiden dan Afghanistan menjadi Republik. Pada tahun 1996, Taliban[[16]](#footnote-17) berhasil merebut Kabul dengan melancarkan serangan ke kota-kota Afghanistan. Pada saat itu, dibawah pimpinan Presiden Burhanuddin Rabbani yang menjabat pada tahun 1992, kaum Taliban tidak puas dengan sikap politik pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Burhanuddin Rabbani. Kaum Taliban menganggap bahwa mereka tidak lagi mencerminkan penegakan syariat Islam secara murni dan konsekwen sesuai cita-cita semula ketika menegakkan perlawanan terhadap kaum kafir Rusia. Akhirnya Taliban menumbangkan pemerintahan Burhanuddin Rabbani dan mengusir pasukan mereka ke utara sampai ke Lembang Panjsher di perbatasan Tajikistan. Kekuatan anti-Taliban yang terusir dari Kabul itu membentuk satu organisasi yang mereka namakan “Aliansi Utara”. Setelah Taliban berkuasa, Taliban membentuk pemerintahan Emirat Islam Afghanistan dengan syariat Islam sebagai dasar negara.[[17]](#footnote-18)

Nasib Afghanistan kemudian berubah menjadi lebih buruk dengan adanya invasi Amerika ke negara tersebut sebagai bagian dari serangan balasan terhadap tragedi 11 September 2001. Pada peristiwa ini, serangan bunuh diri teroris membajak dan menabrakan empat pesawat Amerika dengan sangat dahsyat menghancurkan gedung World Trade Center di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington D.C., Amerika Serikat. Searngan tersebut dikenal sebagai tragedi 9/11 atau *Tragedy Black September.*[[18]](#footnote-19)

Serangan pendadakan terhadap gedung kembar WTC di New York symbol kedigjayaan ekonomi-keuangan, dan gedung Pentagon di Washington D.C., sebuah simbol lain, yaitu keperkasaan militer Amerika di dunia, lantak diserang oleh pesawat komersial nasional Amerika. Amerika hari itu dinyatakan sedang di serang.[[19]](#footnote-20)

Hancurnya gedung kembar WTC dan serangan ke markas Pentagon semakin menegaskan bahwa teroris adalah ancaman yang tidak bisa dianggap mudah. Isu teroris ini merupakan isu terdepan dari kebijakan AS dan menjadi agenda global AS. Peristiwa ini langsung ditanggapi oleh Presiden George Bush dengan menyatakan perang terhadap teroris termasuk mereka yang berada di belakang (mendukung) teroris.[[20]](#footnote-21) Badan-badan keamanan Amerika, tanpa bukti-bukti konkret menuduh Osama bin Laden, multi-milyader asal Saudi Arabia terlibat dengan serangan itu. Presiden George W. Bush bersumpah untuk menghabisi terorisme sampai ke akar-akarnya dan menghukum negara mana saja yang memberikan penampungan, perlindungan, dan dukungan kepada organisasi dan kegiatan terorisme dimana saja mereka berada.[[21]](#footnote-22)

Serangan ini menyadarkan AS dan dunia akan adanya ancaman serius terhadap perubahan pada isu tatanan strategi keamanan dan perdamaian dunia yang diakibatkan oleh kelompok-kelompok teroris. Kesadaran ini dipicu oleh kenyataan bahwa dengan komitmen tinggi, para teroris mampu menembus pertahanan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia serta mampu merancang senjata pemusnah massal dari teknologi canggih yang telah mereka kuasai. Ancaman keamanan yang diakibatkan oleh kelompok teroris menyebabkan pemerintahan dan rakyat AS merasa harus meningkatkan patriotisme dan persatuan nasional yang sangat dilandasi dengan kebebasan (liberty), yang tercermin dari kepercayaan AS terhadap ekonomi pasar bebas serta demokrasi. Kepercayaan ini kemudian terlihat dalam implementasi kebijakan, khususnya kebijakan luar negeri, yang dilakukan oleh AS pascatragedi 11 September 2001.

Salah satu implementasi kebijakan yang langsung dilaksanakan oleh AS berkaitan dengan perang melawan terorisme adalah memutuskan secara unilateral untuk menyerang negara-negara yang diduga kuat terlibat dalam serangan terorisme. Sikap unilateral Amerika Serikat itu menghendaki bahwa umat manusia harus menerima segala kebijaksanaan Amerika Serikat karena itu adalah kebijaksanaan yang benar buat umat manusia dan buat setiap bangsa di dunia. Amerika Serikat bersikap demikian karena ia merupakan satu-satunya kekuatan yang menguasai dunia atas dasar kemampuan militer, ekonomi dan kemampuan politiknya. Namun tidak semua negara mendukung atau setuju dengan sikap unilateral Amerika, mereka berpendapat bahwa umat manusia sebaiknya mengembangkan sikap multilateral. Tidak hanya kekuatan Amerika Serikat yang harus menjamin perdamaian dan kesejahteraan dunia, tetapi juga kekuatan Eropa, Cina, dan Jepang. Mereka menyadari bahwa kekuatan militer Amerika Serikat memang tidak ada yang menyamai, tetapi kekuatan ekonomi Amerika Serikat sekalipun masih terbesar di dunia namun dalam kenyataan amat tergantung pada kekuatan ekonomi Eropa, Jepang dan bangsa-bangsa lain.[[22]](#footnote-23)

Reaksi ini memberikan peluang besar bagi Amerika untuk melancarkan serangan ke negara tujuan teroris, yang menurut AS menjadi ancaman global. Amerika Serikat semakin gencar memerangi terorisme dari pihak manapun, khususnya terhadap Osama bin Laden dan kelompok yang dipimpin olehnya, yaitu Al-Qaeda,[[23]](#footnote-24) dan dituduh sebagai dalang aksi terorisme 11 September 2001. Pemerintah AS secara resmi mengumumkan dan menyatakan pada tanggal 14 September 2001 bahwa Osama bin Laden adalah tersangka utama aksi terror WTC dan Pentagon.[[24]](#footnote-25)

Dengan demikian dapat dilihat bahwa AS memanfaatkan kejadian tersebut yang bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur dalam negara yang membuatnya menjadi suatu ancaman keamanan bagi AS. AS sangat gencar mengampanyekan isu terorisme internasional ke seluruh dunia. Sejak itu pula, Bush bersilat lidah dalam diplomasinya untuk menciptakan citra buruk terhadap pihak yang dituduhnya sebagai teroris. Yang disebut sebagai teroris dalam kamus diplomasi Bush, adalah mereka yang berkebangsaan negara-negara Timur Tengah, tetapi kemudian berkembang lebih luas lagi mengenai muslimin di negara muslim manapun juga.

Pada akhir tahun 2001, kurun waktu di mana serangan teroris terhadap AS terjadi, Taliban tidak memenuhi permintaan pemerintah AS untuk menyerahkan Osama bin Laden, yang bermarkas di Afghanistan. Hal ini memperlihatkan perlindungan yang dilakukan Taliban terhadap Osama bin Laden, yang langsung dianggap AS sebagai sikap mendukung serta melindungi aktivitas kelompok terorisme Al-Qaeda. Penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden dijadikan alasan oleh Bush untuk menjalankan mesin perangnya, oleh karena itu sasaran pertama invasi militer AS dalam rangka perang melawan terorisme adalah Afghanistan, dan ditujukan untuk menggulingkan Taliban yang diduga menaungi Al-Qaeda yang juga dianggap sebagai ancaman berbahaya bagi Amerika.[[25]](#footnote-26)

Dalam hal ini, AS sangat menggempur dengan serangan udara, karena AS beserta perancang senjata dan sekutunya menyadari kekuatan militer rakyat Afghanistan dalam menggunakan serangan darat.[[26]](#footnote-27)Bagaimana sebenarnya wajah negeri dan masyarakat Afghanistan, sehingga membuat bangsa yang mendiaminya tidak pernah mengenal kalah atau merasa dikalahkan. Hal tersebut karena Afghanistan adalah negeri daratan bergunung-gunung yang tidak memiliki pantai dan akses ke laut, termasuk dalam kawasan Asia Tengah.Sejak peristiwa tersebut, keamanan di Afghanistan menjadi isu internasional yang tidak pernah habis. AS terus menyerang Afghanistan walaupun tuduhan terhadap Osama Bin Laden belum terbukti hingga sekarang.

Pasukan Amerika dan Sekutu juga di bantu oleh Pasukan Aliansi Utara, bantuan Aliansi Utara cukup membantu AS karena menguasi dan mengenal wilayah Afghanistan. Pada dasarnya, aliansi utara merupakan kelompok oposisi militer utama terhadap Taliban di Afghanistan. Mereka pada umumnya terdiri dari etnik Tajik dan Uzbek, meski ada juga beberapa kelompok etnik minoritas lain yang bergabung dengan mereka seperi etnik Hazara dan Kyrgiz.[[27]](#footnote-28) Pasukan Aliansi Utara, mendapat bantuan pasokan senjata dari Rusia.

Aksi militer AS di Afghanistan yang tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB merupakan pelanggaran terhadap artikel yang tertuang dalam Piagam PBB. Walaupun pengunaan kekuatan militer suatu negara diperbolehkan dalam rangka mempertahankan diri *(self defence)*, namun hal itu ada tetap batasannya AS menyerang Afghanistan, walaupun terdapat banyak Negara-negara yang bukan pro AS menentang aksi itu, tetapi PBB tidak dapat berbuat banyak menanggapi aksi militer AS, dan AS dapat dengan mudah menyerang Afghanistan dan menjalankan kepentingan politiknya walaupun belum memiliki bukti-bukti kuat tentang keterlibatan Osama Bin Laden.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

**PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP DINAMIKA KONFLIK DI AFGHANISTAN.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

* 1. Sejauh mana implementasi arah dan tindakan kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap dinamika konflik di Afghanistan?
	2. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam kepentingannya di Afghanistan dengan korelasinya terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat?
	3. Sejauh mana Tarik Menarik kelompok-kelompok yang bertikai di Afghanistan?
		1. **Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya permasalahan yang ditemukan, maka penulis perlu membatasi masalah yaitu pada akar permasalahan konflik di Afghanistan dengan adanya tarik menarik kepentingan ideology di Afghanistan, dan korelasiya dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, pada tahun 2001-2018.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

**“Bagaimana Proses Penyelesaian Dinamika Konflik di Afghanistan Korelasinya Dengan Orientasi Strategi Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
	* 1. **Tujuan Penelitian**

Setelah diuraikan latar belakang dan identifikasi masalah, ada pun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi arah dan tindakan Politik Luar Negeri Amerika terhadap dinamika konflik di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik dalam kepetingannya di Afghanistan dengan korelasinya terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Tarik Menarik kelompok-kelompok yang bertikai di Afghanistan.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
5. Diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk melatih cara berpikir secara sistematis dalam meneliti dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
6. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap dinamika Konflik di Afghanistan.
7. Diharapkan dapat menambah peneliti lain yang tertarik akan masalah dan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan atau sebagai bahan perbandingan.
8. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan akan isu-isu keamanan internasional.
9. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian kesarjanaan Strata Satu (s1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Indonesia.
1. Wikipedia, *Sejarah Amerika Serikat,* diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\_Amerika\_Serikat, pada tanggal 6 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Jay, *Amerika Serikat Menjadi Negara Adikuasa,* Dictio Community, 2 Februaru 2017, diakses dari https://www.dictio.id/t/mengapa-amerika-serikat-menjadi-negara-adikuasa/6482, pada tanggal 6 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta: 2003, hal. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Dictio Community, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Goenawan, *Musuh-Musuh Amerika Sepanjang Sejarah,* Saufa, Yogyakarta: 2014, hal. 10 [↑](#footnote-ref-7)
7. Bambang Cipto, *Op.Cit.,* hal. 195 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sri Winingsih*, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran*, diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Analisis.pdf, pada tanggal 6 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-9)
9. Richard F. Grimmett, *Foreign Policy Roles of the President and Congress*, diakses dari

http://fpc.state.gov/6172.htm, pada tanggal 6 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-10)
10. *The National Security Strategy of the United States* adalah dokumen yang disiapkan secara berkala oleh cabang eksekutif pemerintah AS untuk kongres yang mengurai masalah utama keamanan nasional AS, dan bagaimana rencana pemerintah untuk menghadapinnya.*(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/National\_Security\_Strategy\_(United\_States), pada tanggal 6 Februari 2018)* [↑](#footnote-ref-11)
11. Victor Silaen, *Kebijakan Politik Global AS Pasca-Perang Dingin,* yang

terdapat dalam Jurnal Politika Volume 2, No.1, tahun 2006. [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Goenawan, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-13)
13. Mohammad Shoelhi, *Di Ambang Keruntuhan Amerika,* Grafindo, Jakarta: 2007, hal. 9 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* hal. 28 [↑](#footnote-ref-15)
15. Z.A. Maulani, *Perang Afghanistan: Perang Menegakkan Hegemoni Amerika di Asia Tengah,* Dalancang Seta, Jakarta: 2002, hal. 5 [↑](#footnote-ref-16)
16. Taliban adalah gerakan nasionalis Islam Sunni pendukung Pashtun yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afganistan sejak 1996 sampai 2001. Awalnya gerakan pelajar Islam yang pada umumnya sedang belajar di Pakistan.(Z.A. Maulani: 2002) [↑](#footnote-ref-17)
17. Z. A. Maulani, *Op.Cit., hal. 9* [↑](#footnote-ref-18)
18. Kaka Alvian Nasution, *Konspirasi Yahudi: Tangan-Tangan Yahudi Mencengkram Dunia,* Saufa, Yogyakarta: 2004, hal. 262 [↑](#footnote-ref-19)
19. Z.A. Maulani, *Op.Cit.,* hal. 14 [↑](#footnote-ref-20)
20. Richard A. Clarke, *Menggempur Semua Musuh,* terj. Dedi Junaedi, Sinergi: 2004, hal. 6 [↑](#footnote-ref-21)
21. Z.A. Maulani, *Op.Cit.,* hal. 15 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sayidiman Suryohadiprojo, *Unilateralisme VS Multilateralisme*, diakses dari http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/12/, pada tanggal 8 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-23)
23. Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al-Qaeda digolongkan sebagai organisasi teroris internasional oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Britania Raya, Kanada, Australia, dan beberapa negara lain.*(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda, pada tanggal 6 Fberuari 2018)* [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayidiman*, Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Goenawan, *Op.cit.,* hal. 109 [↑](#footnote-ref-26)
26. Elin Yunita Kristanti, *Amerika Serikat Kobarkan Perang di Afghanistan*, 07 Oktober 2014, diakses dari http://global.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan, pada tanggal 8 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-27)
27. Z.A. Maaulani, *Op.Cit., hal. 88* [↑](#footnote-ref-28)